

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa Negara dewasa ini telah mengembangkan kepariwisataan sampai ke desa-desa dengan memajukan potensi lokal. Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemulihan kembali Kepariwisata nasional tidak lepas dari usaha pemerintah untuk menjadikan pembangunan di bidang kepariwisataan sebagai salah satu cara dalam mengurangi kemiskinan. Pembangunan kepariwisataan tersebut salah satunya adalah dengan pengembangan wisata yang mengikutsertakan komunitas lokal. Guna menghadapi fenomena tersebut maka pemerintah menjalankan beberapa program untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Salah satu program yang gencardi jalankan pemerintah adalah program pemberdayaan masyarakat. Banyak program yang dijalankan pemerintah antara lain PNPM Mandiri Perdesaan , PNPM Mandiri Agribisnis , Desa Wisata , PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan,dll.

Salah satu upaya yang sedang ditawarkan pemerintah indonesia guna menyelesaikan permasalahan kemiskinan adalah dengan pembangunan besar besaran pada sektor pariwisata hingga pelosok daerah. Pengembangan pariwisata di daerah bertujuan pula untuk mengontrol jumlah penduduk yang beramai ramai mencari lapangan pekerjaan di kota.

. Hal tersebut menunjukkan bahwa pariwisata adalah faktor yang penting dalam hal pengentasan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian suatu negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu instrumen yang sangat efektif dalam upaya mendorong pembangunan daerah ,pemberdayaan masyarakat , dan juga pengentasan kemiskinan Dalam hal ini dengan adanya sektor pariwisata yang dikembangkan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, memberikan pemasukan bagi daerah, dan dijadikan sebagai objek guna mencari penghasilan bagi masyarakat untuk berdagang. Selain itu apabila pariwisata semakin maju maka akan meningkatkan devisa bagi suatu negara, membuka lapangan pekerjaan serta *diversifikasi* ekonomi. Pemulihan kembali kepariwisataan nasional tidak lepas dari usaha pemerintah untuk menjadikan pembangunan di bidang kepariwisataan sebagai salah satu cara dalam mengurangi kemiskinan. Pembangunan kepariwisataan tersebut salah satunya adalah dengan pengembangan wisata yang mengikutsertakan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, masih banyak pihak yang menyangsikan bahwa pengembangan kepariwisataan dapat memberikan kontribusi yang secara signifikan memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Hal ini terkait dengan perkembangan kepariwisataan saat ini yang telah mengalami pergeseran, semula *mass tourism* menjadi *special interest tourism* .

Pemberdayaan masyarakat di dalam desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata yang terkait langsung dengan jasa pelayanan, yang membutuhkan kerjasama dengan berbagai komponen penyelenggara pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak

pihak yang menyangsikan bahwa pengembangan kepariwisataan dapat memberikan kontribusi yang secara signifikan memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan pun menjadi beragam, guna mengembangkan diversifikasi produk/paket. Wisata budaya menjadi salah satu yang diminati wisatawan, karena selain menikmati keindahan panorama alam, juga dapat menyaksikan keunikan tradisi masyarakat yang dikunjungi¹. Wisatawan merasa jenuh dengan wisata konvensional yang selama ini ditawarkan, sehingga banyak yang beralih ke wisata minat khusus. Meskipun demikian, masih banyak pihak yang menyangsikan bahwa pengembangan kepariwisataan dapat memberikan kontribusi yang secara signifikan memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

Sejak awal tahun 1990an melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, telah berusaha mengembangkan produk desa wisata dengan memanfaatkan desa-desa tradisional yang mempunyai keunikan tinggi. Pada tahun 2003 telah diresmikan beberapa desa wisata di seluruh Indonesia oleh Menbudpar I Gede Ardika, salah satunya adalah Desa Wisata Candirejo di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu provinsi yang telah melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata adalah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini di Jawa Tengah terdapat 125 desa wisata yang telah tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Salah satunya yaitu tersebar di Kabupaten Magelang. Saat ini Pemerintah

¹ Nasikun, 1999, *Globalisasi Dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas, Lokakarya Penataan Pariwisata Dalam Menyongsong Indonesia Baru*

Kabupaten Magelang berupaya mengembangkan lebih dari 50 desa wisata di kawasan Gunung Merapi, wilayah sekitar Candi Borobudur, serta di sepanjang ruas jalan Yogyakarta – Magelang yang tersebar di 7 kecamatan yaitu kecamatan Salam, Dukun, Srumbung, Sawangan, Borobudur, Mungkid dan Mertoyudan.

Di Kecamatan Borobudur terdapat 32 desa wisata, sebagian telah dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Tidak jauh dari Candi Borobudur, sekitar 3 km di sebelah tenggara, ada kawasan wisata yang mulai dilirik oleh wisatawan asing yaitu objek wisata yang diberi nama Desa Wisata Candirejo. Desa Candirejo merupakan desa kecil yang letaknya berdekatan dengan Candi Borobudur. Dahulu, Desa Candirejo adalah kawasan pedesaan biasa yang kerap didatangi oleh wisatawan untuk menginap di sela – sela wisata ke Candi Borobudur. Namun seiring berjalannya waktu, Desa Candirejo ini tidak hanya didatangi sebagai tempat menginap, namun perlahan – lahan menjadi tempat wisata baru.

Pada tanggal 31 Mei 1999 melalui SK Kabupaten Magelang No. 556/1258/19/1999 ditetapkan menjadi “Desa Binaan Wisata Tk. Kabupaten Magelang“. Tahun 1999 sampai 2001 Kelompok Kerja fokus dalam pembinaan dan penguatan pelaku – pelaku wisata. Pada tahun 2001 sampai 2003 mendapat pendampingan dari ISI Yogyakarta, Yayasan PATRA – PALA dan JICA sebagai pendonor dana pembinaan dan penguatan pelaku wisata. Sehingga pada tanggal 19 April 2003 diresmikan sebagai Desa Wisata Internasional oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, I Gede Ardika.

Asal kata Candirejo yaitu *Candi dan Rejo*. Candi berarti batu dan Rejo berarti subur, jadi Candirejo diartikan sebagai sebuah desa yang dikelilingi banyak bebatuan tetapi tanahnya sangat subur. Pada dasarnya perkembangan dunia pariwisata di Desa Wisata Candirejo sudah berkembang, hal ini disebabkan karena faktor demografinya. Melalui berbagai kegiatan wisata yang dikelola oleh masyarakat, wisatawan akan memperoleh pengalaman yang unik dan menarik, misalnya wisata agro, wisata alam, wisata seni dan budaya, wisata kesenian, wisata kerajinan serta wisata kuliner. Desa Wisata Candirejo biasa dikenal dengan Desa "*Eco Tourism*" atau Wisata Lingkungan. Paket wisata yang diandalkan menitikberatkan pada *Eco Tourism* karena Desa Wisata Candirejo memiliki potensi alam yang menarik untuk dikunjungi dan sebagian penduduknya bekerja sebagai petani palawija seperti singkong, kacang – kacangan, cabai merah, jagung, dan lain – lain.²

Wisatawan asing lebih tertarik dengan Desa Wisata Candirejo karena masih mempertahankan keasliannya baik tradisi penduduk maupun lingkungan alam sekitarnya, dan suasana pedesaan Jawa masih terlihat di desa tersebut. Terdapat beragam paket wisata yang ditawarkan seperti *Dokar Tour, Cycling Tour, Walking Around Village, Cooking Lesson, Rafting, Menoreh Hill, dan Homestay* sehingga wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke Desa Wisata Candirejo akan lebih tertarik berkunjung. Hal inilah yang membuat pangsa pasar Desa Wisata Candirejo lebih banyak diminati oleh wisatawan asing daripada wisatawan domestik. Sehingga banyak *Tour Agent* yang membawa

²http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=851&Itemid=

tamu wisatawan asing mereka berkunjung ke Desa Candirejo.

Berdasarkan dari jumlah kunjungan wisatawan asing ke Desa Wisata Candirejo dari tahun 2003 sampai 2015 terlihat mengalami peningkatan. Tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan asing 4.425 dan tahun 2015 mencapai angka 7.238. Hal ini tentunya membuktikan bahwa semakin tahun minat dari wisatawan yang berkunjung semakin bertambah dan kunjungan di Desa Candirejo mengalami peningkatan yang signifikan. Besarnya peningkatan wisatawan asing, bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Kunjungan Wisatawan Asing Tahun 2015

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	162
2	Februari	124
3	Maret	204
4	April	417
5	Mei	314
6	Juni	537
7	Juli	1.155
8	Agustus	1.078
9	September	752
10	Oktober	602
11	November	706
12	Desember	223
Jumlah		7.238

(Sumber : LPJ Pengurus Koperasi Desa Wisata Candirejo Tahun 2015)³

³ Grafik Buku Tamu Wisatawan Desa Wisata Candirejo yang diambil di Koperasi Desa Wisata Candirejo

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung pada bulan Juni – Juli. Hal ini terjadi karena pada bulan tersebut merupakan *Summer Holiday* bagi wisatawan asing karena dibulan itu wisatawan asing mendapatkan cuti panjang dan bagi yang masih bersekolah terdapat libur panjang sehingga dapat digunakan untuk berlibur. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur dan sekitarnya termasuk Desa Candirejo.

Pentingnya penerapan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sektor kepariwisataan di Desa Wisata Candirejo sudah semestinya menjadi keharusan, karena apa yang disuguhkan oleh pariwisata berbasis komunitas ini sangat berbeda jauh dan bertolak belakang dengan jenis pariwisata konvensional yang sedang berlangsung sekarang ini karena pariwisata berbasis komunitas adalah pariwisata yang bersahabat dan ramah terhadap lingkungan.

Adanya pelaksanaan program desa wisata dalam hal pemberdayaan masyarakat memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal, menimbulkan dampak sosial-kultural yang minimal, dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam desa wisata memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi komunitas lokal untuk melibatkan diri di dalam proses pengambilan keputusan keputusan dan di dalam menikmati keuntungan perkembangan industri pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

Yang terpenting dalam hal pelaksanaan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakatnya adalah bagaimana memaksimalkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan pariwisata itu sendiri. Masyarakat diposisikan sebagai penentu, bukan hanya penonton, keterlibatan masyarakat menjadi sebuah keharusan mulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. Masyarakatpun berhak menolak jika ternyata pengembangan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.⁴

Adanya kebijakan pengembangan Desa Wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang bertujuan untuk pelestarian sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisata, kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat⁵. Namun implementasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang masih dirasakan belum maksimal dan belum banyak evaluasi yang diberikan sejak mulai diresmikannya sampai dengan sekarang. Penelitian ini akan mencoba mengetahui dampak pengembangan desa wisata terhadap suatu desa, utamanya dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal melalui pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu akan diambil sebuah kasus yaitu Desa Wisata Candirejo, karena telah menjadi desa wisata sejak tahun 2003 (14 tahun) sehingga terdapat data yang dapat dianalisis. Desa ini memiliki beberapa lokasi yang dapat dijadikan atraksi wisata, seperti Watu Kendil, Banyu Asin, Wisata keliling desa dan Rafting. Selain

⁴ Permanasari, Ika Kusuma. 2006. "Pengembangan Desa Wisata dalam Konteks Pariwisata Berbasis Kerakyatan dan Berkelanjutan". *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 1, No. 2

⁵ Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

itu upacara tradisional *Nyadran (Ruwahan)* masih dilaksanakan dan kesenian tradisional seperti Jathilan (kuda lumping), Topeng Ireng masih tetap dilestarikan dan menjadi atraksi wisatawan.

Karenanya pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu bentuk paradigma baru pembangunan pariwisata yang mengusung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) demi kesejahteraan rakyat secara lebih merata agar proses kedepannya pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan di Desa Wisata Candirejo dapat tumbuh dan berkembang secara lebih bertanggung jawab.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program desa wisata terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar Desa Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?
2. Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan di Desa Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana langkah meningkatkan potensi wisata di Desa Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?
4. Apa saja peluang & hambatan dalam pengelolaan Desa Wisata di Wisata Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa besar pengaruh pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan suatu desa menjadi desa wisata dilihat dari perubahan sosial ekonomi masyarakatnya. Penelitian ini merupakan eksplorasi untuk mengetahui pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan selama ini di Desa Candirejo, ditinjau dari tantangan yang dihadapi dan peluangnya ke depan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Teridentifikasinya aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui Pelaksanaan Program Desa Wisata di Desa Candirejo.
- 2) Mengetahui kontribusi pengembangan desa wisata terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo.
- 3) Teridentifikasinya potensi, peluang, kendala, dan permasalahan di lapangan yang dapat memajukan dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam hal Pelaksanaan Program Desa Wisata di Desa Candirejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang terkait

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dalam pembangunan desa wisata, manfaat yang ingin dicapai antara lain :

- 1) Menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang , Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan pengembangan dan pembangunan khususnya melalui Comunity Based Tourism desa wisata di indonesia
- 2) Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan kepada lembaga terkait dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui desa wisata.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

1.5.1.1 Socio-Economic Impacts of Tourism on a World Heritage Site:

Case Study of Rural Borobudur, Indonesia, oleh Kausar Devi

Roza Krisnandhi

Penelitian yang dilakukan untuk disertasi ini, menjelaskan tentang dampak sosial ekonomi dari pengembangan pariwisata di sekitar Candi Borobudur, sebagai salah satu warisan budaya, terhadap masyarakat lokal di sekitarnya. Penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa besar interaksi antara masyarakat

lokal dan pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan terhadap pengembangan kawasan Candi Borobudur.

Penelitian mengambil data kualitatif dan kuantitatif dalam periode penelitian tahun 2008 dan 2009. Data-data kuantitatif diperoleh dari statistik pemerintah daerah kabupaten Magelang untuk desa-desa di Kecamatan Borobudur, Provinsi Jawa Tengah. Data kualitatif diambil dari wawancara dengan beberapa penduduk dan narasumber. Data yang diambil untuk melihat pengembangan di sekitar candi Borobudur adalah Produk Domestik Bruto untuk semua desa di kabupaten Magelang.

Meskipun hasil survey yang dilakukan mengindikasikan adanya persepsi positif dari masyarakat, namun pariwisata tidak banyak memberikan lapangan pekerjaan dan tambahan pendapatan. Dampak pariwisata lebih banyak memberikan lapangan pekerjaan pada sektor informal saja. Pendapatan bulanan sejumlah rumah tangga yang menjadi sample penelitian, yang terkait dengan pekerjaan bidang pariwisata, masih berada di bawah upah minimum regional

. Penelitian ini mencakup beberapa wilayah di Kecamatan Borobudur, sedangkan masing-masing desa di sana memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga masih bersifat makro. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap salah satu desa di sana, sehingga dapat diketahui lebih mendalam dampak dari pengembangan pariwisata di sekitar candi Borobudur. Penelitian *Socio-Economic Impacts of Tourism on a World Heritage Site: Case Study of Rural Borobudur* menjadi acuan karena data-data yang ada masih baru. Selain itu, penelitian tesis ini lebih fokus hanya pada satu desa saja.

1.5.1.2 Rural Tourism – the Impact on Rural Communities in Thailand, oleh Nuchnard Rattanasuwongchai

Thailand mempunyai berbagai keanekaragaman budaya, tradisi, dan sumber daya alam di perdesaan yang dapat dijadikan atraksi di destinasi wisata. Wisata berbasis desa, dimana wisatawan turut menyatu dalam kehidupan desa, memberikan keuntungan secara ekonomi dan keuntungan lain yang diperoleh dari aktivitas wisatawan di desa

Pengembangan pariwisata di perdesaan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatif antara lain dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Dampak negatif ekonomi apabila pembangunan hotel, resort, dan *travel agent* besar yang ada di perdesaan adalah milik orang asing atau di luar desa. Karyawan, makanan, minuman dan sebagainya biasanya diperoleh dari luar desa. Penduduk lokal hanya bekerja pada level bawah saja, sehingga terjadi banyak kebocoran antara pariwisata dan produksi lokal. Dampak lingkungan terjadi bila jumlah wisatawan yang datang ke perdesaan jumlahnya banyak (*mass tourism*), yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dampak sosial budaya dapat terjadi bila masyarakat desa melihat wisatawan yang datang dari kota terlihat modern dan memiliki banyak uang, membuat masyarakat desa ingin mengikuti pola hidup mereka atau bahkan ikut urbanisasi untuk dapat pekerjaan dan uang.

Dampak positif terhadap pembangunan pariwisata di desa dapat memberikan pembangunan infrastruktur fisik desa. Namun demikian, pembangunan infrastruktur dan fasilitas penting lainnya harus dibangun dengan design dan jumlah yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk lokal.

Kedatangan wisatawan di destinasi perdesaan juga harus memperhitungkan daya tampung desa dan lingkungannya. Selain itu, penting adanya zonasi manajemen dalam pembangunan pariwisata yang harus diperhatikan oleh pemerintah lokal, pengusaha swasta, penduduk lokal, dan wisatawan

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Program Desa Wisata

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya jumlah masyarakat miskin di perdesaan, membuat pemerintah membuat banyak program untuk desa⁶. Hampir semua program kebijakan perdesaan sering identik dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Pembangunan pariwisata diharapkan mampu menjangkau sampai ke perdesaan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh penduduk desa. Selain itu, pariwisata merupakan wahana yang baik untuk pemberdayaan masyarakat dengan adanya konsep desa wisata.

Desa Wisata adalah suatu wilayah pedesaan dengan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian “desa”, baik dari struktur ruang, arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial-budaya masyarakatnya, serta mampu

⁶ Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok wisatawan seperti akomodasi, makanan dan minuman, cinderamata, dan atraksi-atraksi wisata .

Dari definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan adanya dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata. Komponen pertama adalah akomodasi, yang terdiri dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Sedangkan komponen kedua adalah atraksi, yang dalam hal ini meliputi seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan dengan partisipasi aktif seperti bahasa, membuat ukiran, membatik, menenun, dan lain-lain

Didalam desa tersebut harus juga mampu menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan suatu perjalanan wisata, baik dari aspek daya tarik maupun berbagai fasilitas pendukungnya. Jika ingin mengembangkan suatu wilayah (desa) untuk menjadi suatu Desa Wisata, maka perlu diteliti apakah wilayah tersebut memenuhi unsur-unsur desa wisata yang ada. Unsur-unsur tersebut diantaranya memiliki potensi wisata dan budaya yang khas, lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan kepariwisataan atau setidaknya berada dalam rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual, diutamakan tersedianya tenaga kerja pengelola, pelatih, dan pelaku pariwisata, seni, budaya dan adanya aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung dalam hal program desa wisata serta terjaminnya keamanan, ketertiban dan juga kebersihan.

Desa wisata diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat setempat. Keaslian lokal dengan keunikan yang dimiliki desa setempat dapat membawa pengalaman tersendiri bagi wisatawan. Dengan adanya akomodasi yang memadai untuk para wisatawan, ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan membuat mereka merasa nyaman dan senang untuk tinggal berlama-lama. Selain masyarakat setempat memperoleh manfaat dari kedatangan wisatawan, mereka pun dapat sekaligus menjaga dan mempertahankan budaya lokal serta pelestarian alam di wilayah mereka, karena hal itulah yang menjadi modal utama masyarakat lokal.

Di Indonesia, konsep pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata baru berkembang pada tahun 1990an. Konsep ini dibangun untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya perdesaan di sekitar objek wisata. Sebelumnya, pembangunan di objek wisata hanya dirasakan manfaatnya oleh para pemodal (*investor*) saja. Ketika berkunjung ke objek wisata, wisatawan menginap di hotel berbintang, makan minum di restoran, ditemani oleh *tour guide/tour operator* dari perusahaan besar. Masyarakat sekitar objek wisata hanya menjadi penonton dari kucuran rupiah yang dikeluarkan oleh wisatawan. Kalau pun ada, mungkin hanya sebagian kecil saja misalnya sebagai penjual cenderamata keliling, rumah makan kecil, dan lain-lain. Pada tahun 1992 Ditjen Pariwisata, Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi merancang pengembangan alternatif model pariwisata yang disebut Desa Wisata Terpadu. Tujuan dari dibentuknya desa wisata adalah menjawab kritik bahwa masyarakat lokal tersisihkan dengan adanya pengembangan pariwisata, untuk mempertahankan dan meningkatkan kebanggaan

pada budaya lokal, mempertahankan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mengurangi laju urbanisasi⁷.

Isu strategis dalam pengembangan pariwisata bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal antara lain:

1. Pentingnya dukungan peran serta dan inisiatif masyarakat. Dalam hal ini pengembangan pariwisata memerlukan peran serta dan inisiatif masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi obyek wisata. Peran aktif masyarakat tersebut khususnya untuk membantu menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan wisata, dalam hal ini masyarakat sekitar diharapkan dapat menjadi tuan rumah (*host*) yang baik, maupun turut aktif sebagai pelaku pariwisata yang simpatik (penyedia jasa-jasa yang diperlukan tamu/wisatawan, antara lain makan minum, akomodasi, transportasi dan sebagainya) serta sekaligus sebagai wisatawan.

2. Area keterlibatan masyarakat lokal. Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, terdapat 3 (tiga) area yang memungkinkan masyarakat dapat terlibat dalam proses pengembangan, yaitu: (1) tahap perencanaan (*planning stage*); (2) implementasi atau pelaksanaan (*implementation stage*); (3) serta dalam hal mendapatkan

⁷ Suwantoro, Gamal .2004 . Dasar Dasar Pariwisata (Ed.II).Yogyakarta: ANDI

manfaat atau keuntungan (*share benefits*) baik secara ekonomi maupun sosial budaya.

Penguatan usaha ekonomi masyarakat sebagai salah satu hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat terutama berkaitan dengan optimalisasi nilai manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata bagi masyarakat setempat/lokal. Sebagaimana menjadi salah satu prinsip dalam konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) bahwa pengembangan pariwisata harus memberikan nilai manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat. Selain itu pariwisata memiliki agenda untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu, peluang dan kesempatan serta akses masyarakat terhadap nilai manfaat ekonomi pariwisata harus dioptimalkan.

1.5.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Konsep “pemberdayaan” (*empowerment*) telah mengubah konsep pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan khususnya di perdesaan. Perubahan ini sering disebut orang sebagai perubahan paradigma atau serangkaian perubahan mulai dari tataran konsep, teori, nilai-nilai, metodologi sampai ke tataran pelaksanaannya. Perubahan ini telah memengaruhi isi Laporan Indeks Pembangunan Manusia (Human Index Development) yang setiap tahun dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Organisasi ini menyatakan “Pembangunan seharusnya diayam oleh rakyat bukan sebaliknya menjadi penonton pembangunan dan seharusnya pula pembangunan memperkuat rakyat bukan justru membuat rakyat semakin lemah”.

Pemberdayaan menjadi konsep kunci untuk menanggapi kegagalan pelaksanaan pembangunan selama ini. Sejak dicanangkan konsep pembangunan pada akhir masa perang dunia kedua, ternyata pembangunan membuat orang semakin miskin atau jumlah orang miskin semakin banyak, gagasan modernisasi pun rontok karena tidak mampu meneteskan hasil-hasil pembangunan kepada kelompok masyarakat termiskin, juga semakin diakui bahwa pemerintah ternyata tidak mampu mengentaskan kemiskinan dan bahkan pembangunan merusak lingkungan hidup.

Konsep pemberdayaan masyarakat mengacu pada bagaimana masyarakat setempat memiliki pengaruh yang besar secara sosial maupun secara organisasi kemasyarakatan, sehingga mampu meningkatkan lingkungan hidup mereka. Lingkungan hidup di sini meliputi kombinasi antara penggunaan sumberdaya dan social capital yang ada dengan aktivitas yang dilakukan masyarakat terhadap penggunaan sumberdaya tersebut.⁸

Dalam konsep pemberdayaan, ada tiga komponen yang harus ada, yaitu:

- 1) Enabling setting, yaitu memperkuat situasi kondisi di tingkat lokal menjadi baik, sehingga masyarakat lokal bisa berkeaktivitas. Ibaratnya, membuat “panggung” yang baik, sehingga masyarakat lokal bisa “menari” di atas panggung tersebut.
- 2) Empowering local community. Setelah ada “panggung” yang baik untuk menari, maka masyarakat setempat harus ditingkatkan kemampuannya

⁸ Sumodiningrat, Gunawan . (1996). Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat , Jakarta :PT Bina Rena Pariwaran

“menari”. Artinya, setelah local setting tersebut disiapkan, masyarakat lokal harus ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya, sehingga mampu memanfaatkan setting dengan baik. Hal ini antara lain dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai bentuk pengembangan SDM lainnya.

- 3) Socio-political support. Kalau panggung sudah baik, masyarakat lokal sudah bisa “menari”, maka diperlukan adanya perangkat pendukung lain, seperti perlengkapan, penonton, dan seterusnya, yang tidak lain berupa dukungan sosial, dukungan politik, networking, dan sebagainya. Tanpa dukungan sosial-politik yang memadai, masyarakat lokal tidak akan bisa “menari” dengan baik di “panggung”, meskipun masyarakat tersebut sesungguhnya pintar “menari”.⁹

Teori ini dipakai ketika membedah permasalahan pertama, yaitu bagaimana aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Candirejo yang telah dilakukan pengelola selama ini guna memberikan peningkatan ekonomi masyarakat. Aktivitas pemberdayaan masyarakat diidentifikasi melalui kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan desa wisata. Kegiatan pemberdayaan seyogyanya tidak bertentangan dengan norma-norma yang dipercaya oleh penduduk desa dan tidak ada konflik yang berarti sejak dilaksanakannya. Kegiatan pemberdayaan melalui desa wisata seharusnya memberikan keuntungan secara relatif terhadap penduduk desa termasuk kesempatan untuk dapat mengungkapkan modal sosialnya.

⁹ Pitana, I Gde & Surya Diarta, I Ketut. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Andi Yogyakarta

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰ Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat tidak hanya peningkatan kemampuan SDM saja, tetapi juga bagaimana masyarakat mengelola kekayaan alam dan social capital lainnya. Misalnya saja bagaimana masyarakat dapat membuat kerajinan tangan atau makanan tradisional yang dapat dijual, sehingga terdapat value added atas hasil tanah/perkebunan yang dimilikinya.¹¹

1.5.2.3 Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata Berbasis Masyarakat adalah konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Ada tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat yakni penjelajahan (*adventure travel*), wisata budaya (*cultural tourism*), ekowisata (*ecotourism*).

Pariwisata Berbasis Masyarakat sendiri mempunyai makna lain yaitu

- 1) Bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata,

¹⁰ Permendagri Ri no 7 tahun 2007 pasal 1 ayat 8

¹¹ Konsep Pemberdayaan, Membantu Masyarakat Agar Bisa Menolong Diri Sendiri. Diunduh dari <http://www.pemberdayaan.com/pemberdayaan/konsep-pemberdayaan-membantu-masyarakat-agar-bisa-menolong-diri-sendiri.html>

- 2) Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha usaha pariwisata juga mendapat keuntungan,
- 3) Menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan / pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan demikian Pariwisata Berbasis Masyarakat merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada peran aktif masyarakat lokal (baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak) dalam bentuk memberikan kesempatan dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat lokal¹². Gagasan tersebut sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata. Pariwisata Berbasis Masyarakat sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. Pariwisata Berbasis Masyarakat merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Atau dengan kata lain hal ini merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

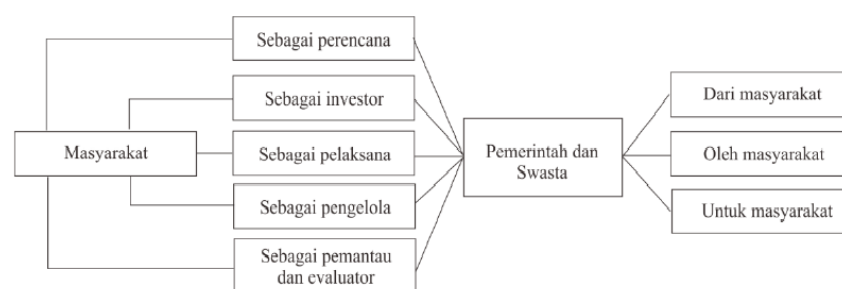
Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat juga merupakan implementasi ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat sendiri. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan ekowisata dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Hasil

¹² Suharo, Edi.2009.Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.Bandung: PT Refika Aditama

kegiatan ekowisata sebanyak mungkin dinikmati oleh masyarakat setempat. Jadi dalam hal ini masyarakat memiliki wewenang yang memadai untuk mengendalikan kegiatan ekowisata. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat secara ideal menekankan pada pembangunan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sampai dengan pemantauan dan evaluasi, masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan akhir pembangunan pariwisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat ¹³

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat digambarkan melalui pola pengembangan sebagai berikut

Gambar 1.1
Pola Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat



Pengembangan desa wisata dilandasi oleh paradigma *community-based tourism*. Konsep pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*)

¹³ Suharo, Edi. 2009 . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama.

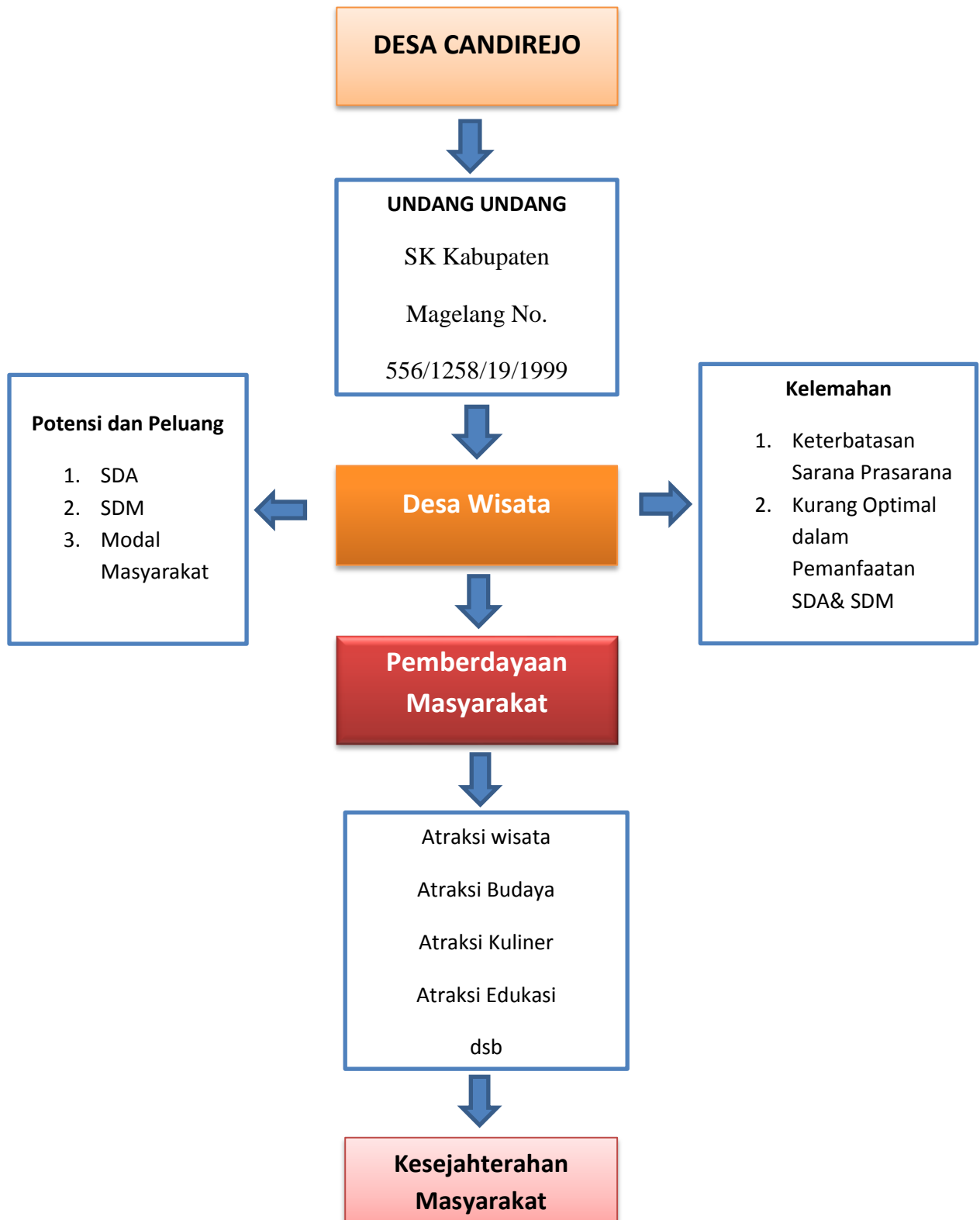
development) tersebut menekankan pada peningkatan keikutsertaan/ peran serta dari masyarakat. Dalam pengembangan pembangunan pariwisata, masyarakat yang merupakan salah satu pemangku kepentingan (disamping pemerintah dan swasta) sangat penting peranannya. Masyarakat setempat sebagai tuan rumah, yang mengetahui seluk beluk daerahnya, adalah sebagai pelaksana/subyek dalam pengembangan pariwisata. Selain itu masyarakat juga sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan.¹⁴

Pengembangan desa wisata perlu melihat dari sisi prinsip-prinsip keseimbangan. Hal ini dapat dilihat dari sisi lingkungan (baik eksternal maupun internal), budaya, serta keterpaduan diantara keduanya. Selain itu pula, keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk tetap menjaga tetap terpeliharanya budaya lokal. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain: aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kesehatan.

¹⁴ Permanasari, Ika Kusuma. 2006. "Pengembangan Desa Wisata dalam Konteks Pariwisata Berbasis Kerakyatan dan Berkelanjutan". *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 1, No. 2

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Kerangka Konsep Pemikiran



1.6.2 Kerangka Konseptual

Unsur unsur Desa Wisata memiliki potensi wisata dan budaya yang khas, lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan kepariwisataan serta tersedianya tenaga kerja pengelola, pelatih dan pelaku pariwisata, seni, budaya, dan adanya aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung dalam hal Program Desa Wisata.

Akomodasi yang memadai untuk para wisatawan, ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan membuat mereka merasa nyaman dan senang untuk tinggal berlama-lama. Selain masyarakat setempat memperoleh manfaat dari kedatangan wisatawan, mereka pun dapat sekaligus menjaga dan mempertahankan budaya lokal serta pelestarian alam di wilayah mereka, karena hal itulah yang menjadi modal utama masyarakat lokal.

Adanya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dibangun untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya perdesaan, di sekitar objek wisata. Sebelumnya, pembangunan di objek wisata hanya dirasakan manfaatnya oleh para pemodal (investor) saja. Ketika berkunjung ke objek wisata, wisatawan menginap di hotel berbintang, makan minum di restoran, ditemani oleh *tour guide/tour operator* dari perusahaan besar. Dan masyarakat sekitar objek wisata hanya menjadi penonton dari kucuran rupiah yang dikeluarkan oleh wisatawan. Kalau pun ada, mungkin hanya sebagian kecil saja misalnya sebagai penjual cenderamata keliling, rumah makan kecil, dan lain-lain.

Melalui berbagai kegiatan wisata yang dikelola oleh masyarakat, wisatawan memperoleh pengalaman yang unik dan menarik, misalnya wisata agro, wisata

alam, wisata seni dan budaya, wisata kesenian, wisata kerajinan, wisata kuliner dan wisata minat khusus.

Lokasi Desa Wisata Candirejo yang berdekatan dengan objek wisata terkenal seperti Candi Borobudur, membuat pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata atau pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) melalui desa wisata menjadi alternatif dalam usaha peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat. Candi Borobudur adalah objek wisata terkenal di seluruh dunia dan menjadi salah satu magnet penarik wisatawan. Pemberdayaan masyarakat bisa berupa bentuk paket wisata yang disediakan dari potensi yang ada dan kemudian diolah agar bisa dijual ke wisatawan yang berkunjung.

Hal ini akan membuat masyarakat harus belajar untuk menjadi penerima tamu yang baik, menyiapkan atraksi yang menarik untuk dikunjungi, menyiapkan paket wisata yang menarik, dan lingkungan yang nyaman bagi wisatawan. Yang tidak kalah pentingnya, dampak peningkatan ekonomi pendapatan juga akan mengalir ke penduduk desa dan juga membuka lapangan pekerjaan yang jauh beragam.

Dalam pelaksanaan Program Desa Wisata Candirejo terdapat hubungan kerjasama antara Instansi Pemerintah, Pemerintah Desa, Masyarakat Sekitar serta Koperasi Desa maupun Pokjawis yang ada. Pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di Desa Candirejo dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Kesejahteraan di sini diharapkan pendidikan dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, peningkatan kualitas kesehatan yang semakin membaik, dan pemerataan pendapatan yang lebih baik.

Peningkatan sosial ekonomi dapat diketahui dari perubahan sebelum dan sesudah desa dijadikan desa wisata. Perubahan tersebut dapat dilihat dari aktivitas masyarakat sehari-hari, perubahan infrastruktur/lingkungan alam desa, perubahan sosial masyarakat, dan ekonomi (peningkatan pendapatan) masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berupa pendekatan deskriptif analitik dengan pemaparan secara komprehensif dari hasil wawancara dan pengamatan kemudian dianalisis secara mendalam dan kritis. Tentunya hasil analisis dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada lokasi penelitian.

Metode kualitatif digunakan, karena bertujuan dan berusaha untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Candirejo melalui program desa wisata. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maksud dan tujuan penelitian. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian tidak menguji hipotesa dan tidak pula menekankan pada generalisasi, melainkan peneliti dapat menangkap suatu makna dari fenomena yang dinamis tersebut secara utuh sesuai dengan kondisi yang ada.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian yang berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata serndiri mengambil studi lapangan di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang berguna sebagai informan dilakukan secara *purposive sampling*, dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Maka informan penelitian yang akan diambil adalah berasal dari Kasi Industri & Pariwisata Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, Kepala Desa Candirejo, Kepala Koperasi Desa Wisata Candirejo, Masyarakat Desa Candirejo yang tergabung Pokja Wisata Candirejo (*Homestay, Local Guides, Home Industry, Traditional Dance*) serta Wisatawan Mancanegara & Domestik yang berkunjung di Desa Wisata Candiejo.

1.7.4 Jenis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Maka data yang dikumpulkan dan digunakan berupa kata-kata (ucapan, pendapat dan gagasan) maupun tindakan yang diperoleh melalui wawancara. Sekaligus sumber data tertulis berupa dokumen dan arsip resmi yang dimiliki oleh data sekunder.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data sebagai pemenuhan kebutuhan penelitian ini terbagi menjadi dua sumber , yaitu :

1. Sumber data primer.

Digunakan sebagai sumber utama yang secara langsung memberikan data kepada peneliti. Didapatkan melalui wawancara dari para informan, yang telah ditetapkan sebagai responden kedalam subjek penelitian, dan observasi

2. Sumber data sekunder

Digunakan sebagai data pendukung penelitian yang didapat melalui berbagai sumber yang telah terbit sebelumnya, seperti laporan penelitian, karya tulis yang dipublikasikan, dan data-data statistik.¹⁵

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memahami, menangkap dan mengumpulkan informasi dari fenomena yang menjadi perhatian penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik sebagai berikut:

Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, dilakukan untuk memperoleh informasi tertentu dari informan baik secara individu maupun berkelompok. Informasi diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mengarah pada tujuan, dengan cara menanyakan langsung kepada informan. Berbeda dengan wawancara terstruktur yang memiliki daftar pertanyaan terstruktur dan dilengkapi pilihan-pilihan, dalam wawancara semi terstruktur ini pewawancara bertanya sesuai panduan dan dikombinasikan dengan pertanyaan yang muncul seketika pada saat wawancara berlangsung. Dalam metode ini, pertanyaan bersifat terbuka, sehingga pewawancara dapat

¹⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

memperoleh data/informasi tambahan selain dari daftar pertanyaan yang ada. Isi dari pertanyaan dapat disesuaikan dengan proses diskusi, sehingga tujuan dari pertanyaan dapat tercapai.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis dan interpretasi data akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut akan melalui tahapan penyajian data, dan verifikasi.

1. Penyajian data

Penyajian akan menggunakan teks naratif. Serta dimungkinkan pula disertakan grafik, matrik jejaring kerja dan tabel. Dalam hal tersebut penyajian data berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata yang ada di Desa Candirejo.

2. Verifikasi

Tahapan ini merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses. Sekaligus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, walaupun nantinya dimungkinkan akan terjadi perubahan dan perkembangan jika bukti-bukti dan konsekuensi dari perundingan bipartit tidak didukung dengan data yang kuat.¹⁶

Secara garis besar dari tiga tahapan diatas, analisis terhadap bentuk data kualitatif merupakan upaya pada pengorganisasian data, memilah-milahnya

¹⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

menjadi satuan untuk dikelola, disintesis, kemudian mencari dan menemukan polanya, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan kemudian diputuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

1.7.8 Kualitas Data

Keabsahan data agar bisa dipercaya, didapat menggunakan cara Triangulasi Sumber (Sugiyono, 2009: 274-275), kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari informan yang kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan mengenai persamaan, perbedaan dan bagian mana yang spesifik dari sumber informasi tersebut. Kemudian penggunaan bahan referensi, sebagai pendukung peneliti ketika mengumpulkan data dari informan dengan menggunakan alat bantu berupa kamera untuk mengambil gambar dan perekam suara sebagai bukti wawancara.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta hal 274-278